

## OSP 8 PROVINSI GORONTALO LAPORAN UJI PETIK

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Kemajuan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Bulan Maret 2019

Provinsi Gorontalo dengan luasan kumuh sebanyak 248,16 Ha. telah dilakukan intervensi oleh pemda dan program kotaku melalui dana kolaborasi dan BDI TA. 2017 dan 2018, maka dari hasil perhitungan kumuh tingkat kota dan kabupaten sampai dengan akhir tahun 2018 diperoleh data sebagai berikut :

Kota/Kab	Luas Kumuh SK (Ha)	Target PK s/d 2018 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh (Ha)				Sisa Luasan Kumuh (Ha)	% Sisa Luasan Kumuh (Ha)
			2017		2018			
			Absolut	Kumulatif	Absolut	Kumulatif		
1	2	3	4	5=4	6	7=5+6	8=2-7	9=8/2
Kota Gorontalo	191,69	141,42	33,76	33,76	108,735	142,49	49,20	25,67
Kab. Gorontalo	56,47	10,20	0,00	0,00	12,75	12,75	43,72	77,42
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>248,16</b>	<b>151,62</b>	<b>33,755</b>	<b>33,755</b>	<b>121,485</b>	<b>155,24</b>	<b>92,92</b>	<b>37,44</b>

#### 2. Realisasi Terhadap Target Triwulan Satu 2019 Basis Master Schedulle

##### 2.1. Persiapan Tingkat Provinsi

Target OSP untuk tahapan persiapan adalah dukungan teknis kepada Satker PKP Provinsi terkait personil Tim Korkot dan Tim Fasilitator 2019 sehubungan dengan adanya Surat Direktur Nomor : UM 01 II - CK/459 tanggal 27 Desember 2018, perihal Komposisi Tim Koordinator Kota dan Fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung percepatan pengurangan kumuh dilakukan perpanjangan kontrak tanpa harus melakukan perekrutan baru untuk posisi yang kosong. Kepala Satker PIP Provinsi Gorontalo segera melaksanakan perpanjangan kontrak dengan Tim Korkot dan Tim Fasilitator sesuai kondisi eksisting per Desember 2018, sehingga ditetapkanlah kontrak tambahan selama dua bulan melalui dokumen perpanjangan kontrak kerja sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.

## 2.2. Kegiatan Tingkat Kota

- a. Kota prioritas di Kota Gorontalo, telah mempunyai *Memorandum Program RP2KPKP* sebagai dokumen turunan perencanaan peningkatan kualitas dan pencegahan tumbuhnya kumuh baru.
- b. Tim Korkot telah memfasilitasi kolaborasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, forum organisasi perangkat daerah dan tingkat kota.
- c. Dokumen skala Kawasan kota Gorontalo telah masuk di tahapan proses pengajuan lelang 2019.
- d. Pengelolaan data SIM berupa inputing pelaksanaan kegiatan 2018, capaian kolaborasi 2018 dan target kolaborasi 2019 serta dokumen profil kota telah selesai.
- e. Pelaksanaan audit independent oleh KAP kepada BKM Tahun Buku 2018 dan audit BPKP sudah selesai.

## 2.3. Pendampingan Tingkat Kelurahan/Desa

- a. Hasil fasilitasi pembentukan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP), saat ini telah berjalan aktif.
- b. Fasilitasi pengesahan dokumen RPLP, kolaborasi dan integrasi RPLP ke dalam musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan serta penyusunan profil kelurahan/desa sudah selesai.
- c. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan skala lingkungan TA. 2019, penyiapan lahan, pembentukan KSM, penyusunan DED dan berkas pencairan dana skala lingkungan sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) telah selesai dilakukan di 9 (Sembilan) kelurahan.

### 3. Relevansi Data Capaian Basis SIM

Finalisasi capaian program 2018 basis SIM (KPI, Investasi & Fasilitasi Program) dan dokumentasi administrasi kegiatan, status akhir Maret 2019 adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Tahapa Persiapan

KOTA / KAB	Cakupan		Informasi kelurahan		Media sosialisasi	
	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	2017	2018
KAB. GORONTALO	18	5	18	5	23	23
KOTA GORONTALO	44	6	44	6	50	50
	62	11	62	11	73	73

#### 3.2. Pelatihan, Status Pokja dan Pemilu BKM

Pelatihan Masyarakat		Status Pokja Kota/Kab				Pemilu BKM		
2017	2018	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
23	23		1	1	1		17	6
50	50	1	1	1	1			21
73	73	1	2	2	2	0	17	27

#### 3.3. Investasi Lima Tahunan

KOTA / KAB	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KAB. GORONTALO		23	23	23	23	23
KOTA GORONTALO	4	50	50	50	50	50
Dembe 1, Lekobalo, Pilolodaa		1	1			
Limba B, Limba U1, Biawu, Biawao, Siendeng		1	1			
Ipilo, Bugis		1	1			
Pohe, Tanjung Kramat, Tenda		1	1			
Leato Utara, Leato Selatan		1	1			

#### 3.4. Pelaksanaan

KOTA / KAB	Cakupan		Audit		Pengukuran Kinerja BKM				Pemilu BKM		
	Pencegahan	peningkatan	2017	2018	2017 SMTR 1	2017 SMTR 2	2018 SMTR 1	2018 SMTR 2	2016	2017	2018
KAB. GORONTALO	18	5	23	23	23		23	23		17	6
KOTA GORONTALO	44	6	50	50	50		50	50			21
Total	62	11	73	73	73	0	73	73	0	17	27

Data SIM tersebut di atas, telah *uptodate* setelah dilakukan perbaikan antara RO (fakta lapang) dengan SIM sudah sama.

#### 4. Tujuan Uji Petik

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara langsung terhadap capaian kegiatan pencairan dan pemanfaatan BDI skala lingkungan tahun Anggaran 2018. Adapun tujuan khusus adalah untuk memastikan dipenuhinya pengelolaan dan proses pemanfaatan BDI Tahun Anggaran 2018 :

- 4.1. Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan (DED dan Proposal KSM);
- 4.2. Penyaluran BDI tahun 2018 kepada KSM tepat waktu;
- 4.3. Pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi / kualitas infrastruktur;
- 4.4. Kelengkapan Pemberkasan pencairan BDI 2018 tahap II lokasi scale up dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- 4.5. Penginputan data E-Mon Padat Karya sudah dipahami;
- 4.6. Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan dan tindaklanjutnya.

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah adanya:

- Dokumen DED dan Proposal KSM yang memenuhi standar teknis perencanaan;
- BKM telah menyalurkan BDI tahun 2018 kepada KSM di seluruh kelurahan;
- Hasil pembangunan infrastruktur berkualitas baik / memenuhi standar teknis;
- Pemberkasan pencairan BDI 2018 tahap II lengkap dan tepat waktu;
- Data Tenaga Kerja Padat Karya terinput ke dalam E-Mon sesuai jadwal dan target yang ditetapkan; dan
- Adanya Berita Acara Catatan dan rekomendasi hasil uji petik.

## 5. Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

### 5.1. Input Dan Proses Siklus Persiapan Perencanaan

MATERI UJI PETIK		NILAI	
		YA	TIDAK
<b>1. TUJUAN; Mengetahui Input dan Proses Siklus Persiapan - Perencanaan</b>			
1.1	Apakah sudah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi	8	
1.2	Apakah sudah dilaksanakan kegiatan Penguatan TIPP	8	
1.3	Apakah sudah dilaksanakan kegiatan Refleksi Perkara Kritis di tingkat basis	8	
1.4	Apakah dilaksanakan kegiatan Pemetaan Swadaya pada 7 indikator kumuh	8	
1.5	Apakah dilaksanakan kegiatan Review dan Updating Baseline	8	
1.6	Apakah data baseline digunakan dalam analisa dan penyusunan perencanaan	8	
1.7	Apakah dilakukan kajian kebijakan tingkat Kota dan tingkat Kelurahan/Desa yang terkait langsung dengan penyusunan RPLP	8	
1.8	Apakah proses analisa telah dilakukan dan memuat proyeksi kebutuhan 5 tahun	8	
1.9	Apakah proses kajian menggunakan peta dasar dan peta-peta tematik	8	
1.10	Apakah dilakukan kajian safeguard lahan dan sosial	8	
1.11	Apakah telah dilaksanakan Uji Publik	8	
1.12	Apakah dokumen RPLP telah dijamin kualitasnya melalui instrumen verifikasi	8	
1.13	Apakah penyusunan Aturan Bersama memuat langkah-langkah OP dan kelembagaan KPP	8	
1.14	Apakah telah disusun DED pada kawasan prioritas untuk tahun pertama (2017)	8	
1.15	Apakah dilakukan forum konsultasi dengan Pemda/Pokja	8	

### 5.2. Kelengkapan Dokumen RPLP

MATERI UJI PETIK		NILAI	
		YA	TIDAK
<b>2. TUJUAN; Mengetahui Kelengkapan Dokumen RPLP</b>			
2.1	Memuat Visi dan Misi Desa/Kelurahan	8	
2.2	Memuat profil permukiman kumuh yang berbasis data numerik dari baseline	8	
2.3	Memuat peta-peta tematik kajian data dan rencana yang jelas dan lengkap (minimal 7 peta indikator) dengan skala 1:5.000	8	
2.4	Memuat analisa dan kajian kebijakan dari perencanaan tingkat Kabupaten/Kota	8	
2.5	Memuat Konsep dan Rencana Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	8	
2.6	Memuat Rencana Pengurangan Luasan Kumuh selama 5 tahun	8	
2.7	Memuat Konsep dan Rencana Penanganan Kumuh Kawasan Delineasi	8	
2.8	Memuat Rencana Kegiatan dan Investasi Penanganan Kumuh Desa/Kelurahan yang sesuai dengan permasalahan kumuh sesuai data baseline (konsistensi)	8	
2.9	Memuat Aturan Bersama sebagai bentuk komitmen masyarakat	8	
2.10	Memuat lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh Pemda, Lurah/Kepala Desa dan BKM	8	

### 5.3. Kelengkapan Dokumen DED

MATERI UJI PETIK		NILAI	
		YA	TIDAK
<b>3. TUJUAN; Mengetahui Kelengkapan Dokumen DED</b>			
3.1	Apakah ada Peta Site Plan	8	
3.2	Apakah ada gambaran Visual 3 Dimensi/2 dimensi	8	
	Apakah gambar Kerja /Detail sudah dilengkapi dengan :		
3.3	a. Potongan Memanjang	0	8
3.4	b. Potongan Melintang	8	
3.5	c. Gambar Detail	8	
3.6	Apakah sudah dibuat Jadwal Induk/Time Schedule	8	
3.7	Apakah ada daftar Kuantitas/Volume	8	
	Apakah Rencana Anggaran Biaya (RAB) / DED sudah ada/mencakup :		
3.8	a. Daftar harga satuan upah, bahan dan alat	8	
3.9	b. Analisa harga satuan pekerjaan	8	
3.10	c. Perhitungan RAB	8	
3.11	d. Rekapitulasi rencana anggaran biaya	8	
3.12	Apakah ada Spesifikasi Teknik	8	
3.13	Apakah Dokumen DED sudah disetujui dan disahkan	8	

### 5.4. Kesesuaian Program Dengan Penanganan Kumuh

MATERI UJI PETIK		NILAI	
		YA	TIDAK
<b>4. TUJUAN; Mengetahui Kesesuaian Kegiatan Dengan Penanganan Kumuh</b>			
4.1	Apakah kegiatan yang direncanakan tidak termasuk daftar kegiatan terlarang ( <i>Negative List</i> ) ?	8	
4.2	Apakah usulan infrastruktur berada di area kawasan kumuh terdelineasi ?	8	
4.3	Apakah lokasi usulan infrastruktur berada pada kawasan kumuh prioritas penanganan pemda tahun 2017?	8	
4.4	Apakah usulan kegiatan ini sudah sesuai dengan permasalahan kumuh dengan persentase (%) yang besar?	8	
4.5	Apakah peruntukan tanah lokasi kegiatan pada delineasi kumuh sesuai peruntukan RTRW dan tidak bermasalah dari status kepemilikan?	8	
4.6	Apabila kegiatan infrastruktur berada pada sempadan sungai, danau, pantai dll apakah sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Pemda/Instansi terkait ?	8	
4.7	Apakah kegiatan yang membutuhkan pengelolaan lingkungan sudah dilengkapi dengan dokumen pengelolaan dampak lingkungan, seperti UKL-UPL atau SOP/SPPL	8	
4.8	Apakah kegiatan tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, cagar alam/budaya atau Masyarakat Hukum Adat (MHA)?	8	
4.9	Apakah kegiatan tidak akan menyebabkan risiko bencana, seperti longsor/pencemaran air/banjir/atau bencana lain?	8	
4.10	Apabila pelaksanaan pembangunan infrastruktur memerlukan perijinan apakah sudah dilengkapi (seperti IMB, Ijin lingkungan, dll)?	8	
4.11	Apakah usulan infrastruktur tsb sudah merupakan sistem jaringan tersier, skala lingkungan/komunitas ?	8	
4.12	Apakah usulan kegiatan telah dikoordinasikan/disetujui oleh Pokja/SKPD teknis terkait ditingkat Kab/Kota?	8	
4.13	Apakah Usulan kegiatan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja masyarakat (sederhana)?	8	

## B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

NO	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan	Secara keseluruhan data kelembagaan cukup baik	Penilaian kinerja kelembagaan Triwulan pertama belum di laksanakan  Pergantian BKM belum di catatkan pada akta notaris	# sebagian BKM Belum paham dengan ada penilaian kinerja Kelmbagaan  # BKM belum memiliki biaya operasional	# Memberikan penguatan kembali Kepada BKM Tentang Pentingnya Penilaian Kinerja BKM # melakukan komunikasi dengan pokja PKP Tentang pencatatan tersebut bisa di fasilitasi oleh pemda
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Setiap bulan memiliki aduan yang di teruskan kepada fasilitator	di temukanya PIM Manual akan tetapi belum Di catatkan pada pembukuan Aduan	# BKM Belum Memiliki buku Aduan PIM Dan Belum Tersosialisasi Pentingnya PIM	Memberikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bahwa PIM Sebagai alat kontrol untuk transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan
4	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Seluruh dokumen teknis tahun 2018 sudah tercetak dan lengkap	Dokumen perencanaan teknis beserta DED Belum di pahami oleh KSM	Kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan kepada KSM	Perlu adanya sosialisasi kembali mengenai dokumen teknis dan pemaketan kegiatan
5	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Pencairan Dana BPM Tahap satu Masih memiliki kendala	Proses pencairan belum berjalan	Belum ada pejabat PPK yang definitive	Masih menunggu terbitnya SK Satker
6	Kinerja pelaksanaan	Pelaksanaan kolaborasi	✓ Kurangnya sumber kolaborasi	✓ forum kolaborasi	✓ memberikan penguatan

	kolaborasi	belum berjalan efektif	<p>dari pihak swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Forum Kolaborasi belum berfungsi</li> <li>✓ perencanaan kolaborasi tahun 2019 belum maksimal</li> </ul>	<p>hanya di bentuk saja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ belum teridentifikasi kegiatan yang masuk dalam perencanaan musrenbang</li> </ul>	kepada fasilitator dan di tindak lanjuti dengan pembentukan forum kolaborasi kelurahan dan kecamatan
7	Efektifitas kerja KPP	KPP Belum memiliki rencana kerja	O & P Hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi saja dan struktur kelembagaan KPP Belum terlalu nampak fungsinya dan belum memiliki rencana kerja dan aturan bersama yang mengikat	# pendampingan KPP Belum maksimal	Perlu adanya penguatan Agar Kelembagaan KPP bisa terwujud dengan memiliki rencana kerja dan aturan bersama yang akan di laksanakan
	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Data sim valid	data sim sudah sesuai dengan realisasi kegiatan yang ada di lapangan		hari pengimputan sim lebih di optimalkan lagi



